



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



**PERYANTAAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 4/KPN.W4-U8/OT.1.1/I/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

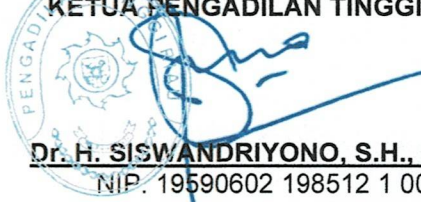
Nama : **ANDRY SIMBOLON, SH, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

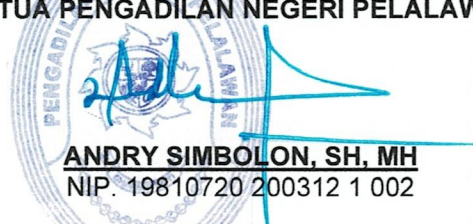
Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Kerinci, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU**

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 19590602 198512 1 001

**Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA
---	--	---	----

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 196.605.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.512.950.000,-

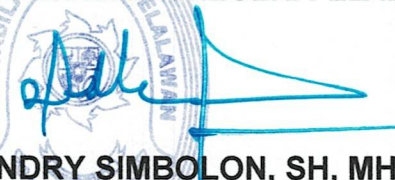
Pangkalan Kerinci, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 19590602 198512 1 001

Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002